

**BPS PROVINSI GORONTALO**

# **Laporan Keuangan Satker**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024**

*(Audited)*



**Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117**

**Telp. (0435) 834596, Fax. (0435) 834597**

**Homepage : <http://gorontalo.bps.go.id>, E-Mail : [bps7500@bps.go.id](mailto:bps7500@bps.go.id)**



## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Provinsi Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Provinsi Gorontalo. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Gorontalo, 5 Mei 2025  
Plt. Kepala,

Dwi Alwi Astuti, SST. M.Ec.Dev  
NIP. 198404022007012005



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	5
Daftar Lampiran	79
Pernyataan Tanggung Jawab	6
Indeks Singkatan	7
I. Ringkasan	7
I. Laporaan Realisasi Anggaran	10
II. Neraca	11
III. Laporan Operasional	13
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
A. Penjelasan Umum	15
A.1 Profil Dan Kebijakan Teknis	15
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	16
A.3 Basis Akuntansi	17
A.4 Dasar Pengukuran	17
A.5 Kebijakan Akuntansi	17
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	29
B.2 Belanja Negara	31
B.3 Belanja Pegawai	32
B.4 Belanja Barang	33
B.5 Belanja Modal	34
B.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	35
B.5.2 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	36
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	37
C.1 Persediaan	37
C.2 Tanah	38
C.3 Peralatan Dan Mesin	39
C.4 Gedung Dan Bangunan	41
C.5 Aset Tetap Lainnya	41
C.6 Akumulasi Penyusutan	42
C.7 Aset Tak Berwujud	43
C.8 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	44
C.9 Aset Lain-lain	45
C.10 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	46



C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga	46
C.12 Ekuitas	47
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	48
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	48
D.2 Beban Pegawai	49
D.3 Beban Persediaan	52
D.4 Beban Barang Dan Jasa	52
D.5 Beban Pemeliharaan	55
D.6 Beban Perjalanan Dinas	56
D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi	58
D.8 Kegiatan Non Operasional	59
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
E.1 Ekuitas Awal	60
E.2 Surplus/defisit-lo	60
E.3 Koreksi Menambah/mengurangi Nilai Ekuitas	60
E.3.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	60
E.4 Transaksi Antar Entitas	61
E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain (dkel)	62
E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar	63
E.5 Ekuitas Akhir	68
F. Pengungkapan Lainnya	68



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Uraian Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	19
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
Tabel 4	Rincian Anggaran	24
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	29
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan	30
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	31
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja	31
Tabel 9	Perbandingan Belanja Pegawai	32
Tabel 10	Perbandingan Belanja Barang	33
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	35
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36
Tabel 14	Rincian Persediaan	37
Tabel 15	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	42
Tabel 16	Rincian Aset Tak berwujud	43
Tabel 17	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	46
Tabel 18	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	47
Tabel 19	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	48
Tabel 20	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	49
Tabel 21	Rincian Beban Pegawai	49
Tabel 22	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	50
Tabel 23	Rincian Beban Persediaan	52
Tabel 24	Rincian Beban Barang dan Jasa	52
Tabel 25	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	54
Tabel 26	Rincian Beban Pemeliharaan	55
Tabel 27	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	56
Tabel 28	Rincian Beban Perjalanan Dinas	57
Tabel 29	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	57
Tabel 30	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	58
Tabel 31	Rincian Kegiatan Non Operasional	59
Tabel 32	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	60
Tabel 33	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	61
Tabel 34	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	61
Tabel 35	Rincian Transfer Masuk	63
Tabel 36	Rincian Transfer Keluar	63



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, 5 Mei 2025  
Kepala,

Dwi Alwi Astuti, SST. M.Ec.Dev  
NIP. 198404022007012005



## INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis



Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp111.368.872 atau mencapai 1.186,67 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp9.385.000.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.126.615.803 atau mencapai 95,89 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.646.742.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.978.039.897 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp151.726.883 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp20.657.058.779 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp169.254.235.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp375.994.474 dan Rp20.602.045.423.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.964.622, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp12.023.158.695 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp12.004.194.073. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp92.338.420 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp11.911.855.653.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp20.829.919.198 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp11.911.855.653 ditambah dengan



koreksi-koreksi senilai Rp-9.563.105 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.693.544.983 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp20.602.045.423.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BPS Provinsi Gorontalo LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024		% terhadap Anggaran	31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	9.385.000	111.368.872	1.186,67	3.514.098.492
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>9.385.000</b>	<b>111.368.872</b>	<b>1.186,67</b>	<b>3.514.098.492</b>
Belanja Negara	B.2	12.646.742.000	12.126.615.803	95,89	17.064.088.746
Belanja Pegawai	B.3	7.917.724.000	7.883.344.201	99,57	7.199.489.082
Belanja Barang	B.4	4.238.213.000	3.753.556.602	88,56	9.668.232.164
Belanja Modal	B.5	490.805.000	489.715.000	99,78	196.367.500
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>12.646.742.000</b>	<b>12.126.615.803</b>	<b>95,89</b>	<b>17.064.088.746</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



**BPS Provinsi Gorontalo**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Persediaan	C.1	151.726.883	215.629.620
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		151.726.883	215.629.620
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		0	0
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.2	4.861.957.000	4.861.957.000
Peralatan Dan Mesin	C.3	14.031.382.933	14.196.157.633
Gedung Dan Bangunan	C.4	18.159.563.000	18.067.362.000
Aset Tetap Lainnya	C.5	300.092.863	300.092.863
Akumulasi Penyusutan	C.6	(16.695.937.017)	(16.542.183.075)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		20.657.058.779	20.883.386.421
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.7	1.663.672.500	1.663.672.500
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.8	166.392.000	0
Aset Lain-lain	C.9	14.380.727	115.056.727
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.10	(1.675.190.992)	(1.770.912.592)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		169.254.235	7.816.635
<b>JUMLAH ASET</b>		20.978.039.897	21.106.832.676
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			



Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	375.994.474	276.913.478
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>375.994.474</b>	<b>276.913.478</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.12	20.602.045.423	20.829.919.198
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>20.602.045.423</b>	<b>20.829.919.198</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>20.978.039.897</b>	<b>21.106.832.676</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPS Provinsi Gorontalo**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**  
*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	18.964.622	3.514.098.492
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		18.964.622	3.514.098.492
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	7.899.124.275	7.205.124.869
Beban Persediaan	D.3	245.784.717	466.462.329
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.710.409.846	4.596.479.743
Beban Pemeliharaan	D.5	409.785.909	451.386.203
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.121.458.869	3.887.450.061
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	636.595.079	779.885.171
<b>JUMLAH BEBAN</b>		12.023.158.695	17.386.788.376
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		(12.004.194.073)	(13.872.689.884)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	8.866.970
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		65.830	36.097.698
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		92.338.420	(44.964.668)
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		(11.911.855.653)	(13.917.654.552)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPS Provinsi Gorontalo**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas awal	E.1	20.829.919.198	21.862.708.638
Surplus/defisit-LO	E.2	(11.911.855.653)	(13.917.654.552)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	(9.563.105)	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.1	(9.563.105)	0
Transaksi Antar Entitas	E.4	11.693.544.983	12.884.865.112
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	12.015.246.931	13.549.990.254
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	(321.701.948)	(665.125.142)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(227.873.775)	(1.032.789.440)
Ekuitas Akhir	E.5	20.602.045.423	20.829.919.198

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



## Catatan Atas Laporan Keuangan

### Entitas dan Rencana Strategis dan **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Provinsi Gorontalo**

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: Visi BPS :

**"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"**

*("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")*

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan



dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya dengan dukungan dan peranan TIK.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen BPS. Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :
  1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
  2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
  3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
  4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun



yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis  
Akuntansi

### **A.3. Basis Akuntansi**

BPS Provinsi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar  
Pengukuran

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Provinsi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan  
Akuntansi

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.



Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-  
LRA

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan  
LO

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 1  
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang*

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%



	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan



Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

## Penyusutan Aset Tetap

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 2*  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun



Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 3*  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20



Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Provinsi Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Selama periode berjalan, BPS Provinsi Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

- Anggaran Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dengan nilai Rp9.385.000,- merupakan estimasi biaya pendapatan setelah adanya realisasi pendapatan satker tahun 2024. Tetapi anggaran ini tidak masuk pada DIPA maupun POK satker BPS Provinsi Gorontalo.
- Anggaran Belanja pada satker BPS Provinsi Gorontalo sebesar Rp13.069.606.000,- selama periode sampai dengan 31 Desember 2024 dilakukan perubahan atau revisi anggaran sebanyak 13 kali, baik DIPA maupun POK sehingga anggaran akhir sebesar Rp12.646.742.000,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp7.917.724.000, belanja barang sebesar Rp4.236.213.000, dan belanja modal sebesar Rp490.805.000,-.

Tabel 4  
Rincian Anggaran

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	9.385.000	9.385.000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>9.385.000</b>	<b>9.385.000</b>
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	8.623.086.000	7.917.724.000
BELANJA BARANG	4.446.520.000	4.238.213.000
BELANJA MODAL	0	490.805.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13.069.606.000</b>	<b>12.646.742.000</b>



#### Revisi I Tanggal 18 Januari 2024 :

- Revisi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Utama BPS No. B-7/02000/PR.440/2024 tanggal 8 Januari 2024 terkait automatic adjustment belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Revisi ini menyebabkan adanya pemblokiran kegiatan dan anggaran pada Program PPIS sebesar Rp702.903.0000,-. Penyesuaian anggaran pada Revisi DIPA I ini tidak mengubah pagu anggaran, pagu tetap sebesar Rp13.069.606.000, -.
- Revisi POK I merupakan revisi dalam rangka tindak lanjut surat Direktur Statistik Industri No B-85/05300/VS.100/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencetakan Dokumen Survei Direktorat Statistik Industri 2024 dan sekaligus revisi POK kewenangan KPA untuk memenuhi kebutuhan belanja barang. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.069.606.000, -.

#### Revisi II Tanggal 20 Februari 2024 :

- Revisi DIPA II ini merupakan Revisi Kanwil DJPB dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan periode RPD Triwulan I sebagaimana tertuang dalam surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-0325/75000/PR.440/2024 Tanggal 16 Februari 2024. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.069.606.000, -.

#### Revisi III Tanggal 5 April 2024

- Revisi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sestama BPS RI Nomor: B-151/02000/PR.440/2024 Tanggal 8 Maret 2024 untuk mengakomodir penyesuaian anggaran pada Program Dukman dan Program PPIS. Revisi ini menyebabkan penambahan pagu Dukman sebesar Rp338.943.000,-. Penambahan anggaran diperlukan dalam rangka belanja modal penataan PST sebesar Rp196.677.000,-. Penyelenggaraan pleno EPSS senilai Rp110.046.000,- serta penambahan biaya untuk konsumsi rapat dalam rangka mendukung kegiatan teknis dan kegiatan rilis data BPS sebesar Rp32.220.000,-.

Penyesuaian anggaran juga terdapat pada Program PPIS yang menyebabkan pengurangan anggaran sebesar Rp299.187.000,-. Penyesuaian meliputi realokasi anggaran antar kegiatan, penyesuaian dan realokasi anggaran Automatic Adjustmen dan realokasi anggaran antar satker sesuai dengan lokasi kegiatannya. Penyesuaian anggaran PPIS ini juga menyebabkan pagu blokir AA berkurang Rp17.608.000,- atau dari semula Rp702.903.000,- menjadi sebesar Rp685.295.000,-. Secara total pagu anggaran



bertambah sebesar Rp39.756.000,- atau total pagu menjadi sebesar Rp13.109.362.000,-.

- Revisi DIPA III ini merupakan Revisi Kanwil DJPB dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan periode RPD Triwulan II sebagaimana tertuang dalam surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-0672/75000/PR.440/2024 Tanggal 19 April 2024. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.109.362.000, -.

Revisi IV Tanggal 22 Mei 2024 :

- Revisi Satker II ini merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi undangan Sestama BPS No.: B-319/02000/PR.110/2024 tanggal 8 Mei 2024, Konreg PDRB Kasulampua di Sulawesi Barat dan revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.109.362.000, -.

Revisi V Tanggal 3 Juni 2024 :

- Revisi DIPA V ini merupakan Revisi Kanwil DJPB dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyesuaikan kembali rencana penarikan dana khususnya RPD mei dan juni dalam rangka memaksimalkan nilai IKPA sebagai tindak lanjut atas perubahan teknis penilaian IKPA sesuai PER-5/PB/2024.

Revisi ini sesuai dengan Surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-0942/75000/PR.440/2024 Tanggal 30 Mei 2024. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.109.362.000, -.

Revisi VI Tanggal 25 Juni 2024 :

- Revisi Satker III merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan Evaluasi SHK, Evaluasi SEP dan revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.109.362.000, -.
- Revisi ini merupakan Revisi Kanwil DJPB dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk periode RPD Triwulan III sebagaimana tertuang dalam surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-1285/75000/PR.440/2024 Tanggal 9 Juli 2024. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, baik pagu blokir Automatic Adjustmen maupun pagu total. Sehingga pagu



blokir tetap sebesar Rp685.295.000,- dan pagu total tetap sebesar Rp13.109.362.000, -.

Revisi VII Tanggal 15 Agustus 2024 :

- Revisi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Sestama BPS RI Nomor: B-532/02000/PR.450/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Revisi DIPA Juli TA 2024. Revisi ini untuk mengakomodir penyesuaian anggaran pada Program Dukman dan Program PPIS. Revisi ini menyebabkan penambahan pagu operasional pada Program Dukman sebesar Rp160.540.000,-, pengurangan anggaran konsumsi rapat sebesar Rp17.475.000,-. Pada revisi ini BPS Prov. Gorontalo mengikutsertakan revisi antar satker untuk realokasi belanja pegawai sehingga pagu belanja pegawai berkurang sebesar Rp220.000.000,-. Secara total anggaran pada Program Dukman berkurang sebesar Rp.76.935.000,-.
- Penyesuaian anggaran juga terdapat pada Program PPIS yang menyebabkan pengurangan anggaran sebesar Rp48.387.000,-. Penyesuaian meliputi realokasi anggaran antar kegiatan dan antar satker. Penyesuaian anggaran PPIS ini juga sekaligus dilakukan pembukaan pagu blokir AA untuk kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Seruti TA 2024 sehingga pagu blokir AA berkurang Rp347.071.000,- atau dari semula Rp685.295.000,- menjadi sebesar Rp.338.224.000,- Secara total pagu anggaran berkurang sebesar Rp123.882.000,- atau total pagu menjadi sebesar Rp12.985.540.000,-.
- Revisi Satker IV tanggal 21 Agustus 2024 merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka rekomendasi inspektorat akun ekstrakomptabel revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp12.985.540.000, -.

Revisi VIII Tanggal 18 September 2024 :

- Revisi DJA dalam rangka melakukan penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024. Tidak terdapat perubahan pagu pada program Dukungan Manajemen (Dukman) sehingga pagu masih tetap Rp. 10.897.778.000 sedangkan untuk Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terdapat penyesuaian belanja kegiatan dimana terdapat selisih pagu bertambah sebesar Rp 19.640.000. Revisi ini mengakibatkan pagu total bertambah menjadi Rp. 13.005.180.000,-

Revisi IX Tanggal 16 Oktober 2024 :

- Revisi Kanwil berupa pemutakhiran POK dan penyesuaian halaman III DIPA (penyesuaian realisasi belanja Juli–September 2024 dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober - Desember 2024). Adapun pemutakhiran dan penyesuaian



POK tersebut diperlukan dalam rangka penyesuaian belanja barang (termasuk pada akun program nasional). Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp13.005.180.000.

- Revisi Satker V tanggal 21 Oktober 2024 merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan Rakorda SEP dan revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.005.180.000, -.

Revisi X Tanggal 5 November 2024 :

- Revisi DJA dalam rangka penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024 sesuai Surat Sestama BPS RI Nomor B-860/02000/PR.450/2024, Adapun tujuan dari revisi tersebut diantaranya: 1. Optimalisasi Belanja Pegawai, Penambahan Anggaran Belanja Modal (Laptop), Penyesuaian Belanja Pegawai untuk CPNS.

Revisi XI Tanggal 22 November 2024 :

- Revisi Kanwil dalam rangka Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian dan Lembaga Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-1023/MK.02/2024 Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA serta Surat Sestama BPS RI No. B-928/02000/PR.400/2024 Penyampaian Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas kemudian Surat Sestama BPS RI No. B939/02000//PR/400/2024 Penyampaian Target Penghematan BPS TA 2024 dimana Revisi ini tidak menambah ataupun mengurangi total pagu namun menambah nilai blokir pada Petikan DIPA halaman IV.a dari Rp.334.224.000 menjadi Rp.428.748.000,-
- Revisi Satker VI tanggal 29 November 2024 merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan Workshop Media, kegiatan agen statistik, evaluasi PMTB dan revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp12.621.942.000, -.
- Revisi Satker VII 18 Desember 2024 merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan pembinaan diseminasi, pencetakan kuesioner harga, susenas maret 2025, dan revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp12.621.942.000, -.

Revisi XII Tanggal 26 Desember 2024 :

- Revisi belanja pegawai antar satker karena kekurangan belanja pegawai untuk PPH PNS sehingga perlu dilakukan revisi antar



sattker untuk belanja pegawai. anggaran belanja pegawai BPS Provinsi Gorontalo bertambah sebesar 24.8000.000 yang diperoleh dari satker BPS Kabupaten Gorontalo.

Revisi XIII Tanggal 27 Desember 2024 :

Revisi DIPA 13/revisi pemutakhiran KPA ini merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan statistik distribusi, statistik harga, statistik KTIP, serta operasional dan emeliharaan perkantoran

*Realisasi PNBP B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak*  
*Rp111.368.872*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp111.368.872 atau mencapai 1.186,67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.385.000. Rincian Pendapatan BPS Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

*Tabel 5*  
*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	9.385.000	110.422.542	1.176,59
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	946.330	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.385.000</b>	<b>111.368.872</b>	<b>0</b>

Realisasi pendapatan pengelolaan BMN dengan nilai Rp111.368.872,- merupakan pemanfaatan BMN berupa sewa rumah dinas eselon II dan III periode sampai dengan 31 Desember 2024, dan Pendapatan Dari Hasil Pemindahtanganan BMN periode 31 Desember 2024;

- PNBP berupa sewa rumah dinas eselon II dan III periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.018.292,-
- Pendapatan Dari Hasil Pemindahtanganan BMN berupa lelang BMN sebesar Rp92.404.250,- dengan rincian sbb :
  - Lelang inventaris kantor berupa laptop, printer, ac split, ploter, serial lainnya (publikasi) dan UPS sesuai



- Risalah Lelang Nomor 171/16.02/2024-01 tanggal 28 Mei 2024 dengan nilai Rp7.069.250,-
- Lelang kendaraan dinas roda 2 dan 4 dan peralatan vicon (terminal) sesuai Risalah Lelang Nomor 236/16.02/2024-01 tanggal 12 Juli 2024 dengan nilai Rp85.335.000,-
- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan yakni penjualan data mikro senilai Rp946.330,-

Sehingga Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp111.368.872,- atau mencapai 1.186,67,- persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.385.000.

*Tabel 6*  
*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Realisasi 31 Desember 2023(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	110.422.542	6.521.450	1.593,22
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	946.330	3.507.577.042	(99,97)
<b>Jumlah</b>	<b>111.368.872</b>	<b>3.514.098.492</b>	<b>(96,83)</b>

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 96,83 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2023.

Kenaikan pendapatan seperti yang terlihat pada tabel diatas merupakan Pendapatan Dari hasil lelang Penjualan BMN, Pengelolaan BMN berupa sewa rumah dinas selama tahun 2024 naik sebesar 1.593,22% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi berupa hasil penjualan data mikro sebesar Rp946.330,- atau turun sebesar (99,97) jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya..



Realisasi Belanja  
Negara  
Rp12.126.615.803

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.126.615.803 atau 95,89 persen dari anggaran belanja sebesar Rp12.646.742.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	7.917.724.000	7.883.344.201	99,57
BELANJA BARANG	4.238.213.000	3.753.556.602	88,56
BELANJA MODAL	490.805.000	489.715.000	99,78
Jumlah Netto	12.646.742.000	12.126.615.803	95,89

Total realisasi anggaran s.d periode 31 Desember 2024 sebesar 95,89 persen dengan besaran realisasi belanja pegawai 99,57 persen; belanja barang 88,56 persen; dan belanja modal 99,78 persen. Realisasi tersebut berasal dari rupiah murni (RM) maupun PNBPNP.

Adanya blokir anggaran sejumlah Rp428.748.000 dari pagu anggaran belanja barang berpengaruh pada rendahnya realisasi belanja barang, jika efisiensi anggaran dikeluarkan dari pagu belanja barang realisasi anggaran dapat mencapai 99.25%

Tabel 8  
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	7.893.385.865	7.201.679.254	9,60
BELANJA BARANG	3.753.756.632	9.668.232.164	(61,17)
BELANJA MODAL	489.715.000	196.367.500	149,39
Jumlah Bruto	12.136.857.497	17.066.278.918	(28,88)
Pengembalian Belanja	10.241.694	2.190.172	367,62
Jumlah	12.126.615.803	17.064.088.746	(28,93)



Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 28,93 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2023.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 28,93 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2023 dikarenakan :

- Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan 9,60% dikarenakan adanya penambahan pegawai dan kenaikan gaji berkala serta gaji kenaikan pangkat
- Realisasi belanja barang mengalami penurunan 61,17% dikarenakan terdapat kegiatan publisitas dan pengadaan instrumen kegiatan Sensus Pertanian (ST2023). Meskipun pada tabel perbandingan diatas terlihat belanja pegawai dan belanja modal mengalami kenaikan, namun hal itu tdk mempengaruhi penurunan realisasi belanja periode 31 Desember 2024.
- Realisasi belanja modal mengalami kenaikan 149,39% dikarenakan pada periode ini terdapat pembenanan ruang PST serta perlengkapannya, selain itu adanya pengadaan meubelair serta alat ubinan serta peralatan dan mesin lainnya.

*Belanja Pegawai  
Rp7.883.344.201*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.883.344.201 dan Rp7.199.489.082. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 9  
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2024  
dan 31 Desember 2023*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.019.679.380	3.449.056.407	16,54
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	114.114.722	19.745.080	477,94
Belanja Lembur	63.175.000	74.618.000	(15,34)



Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	3.696.416.763	3.658.259.767	1,04
Jumlah Bruto	7.893.385.865	7.201.679.254	9,60
Pengembalian Belanja	10.041.664	2.190.172	358,49
Jumlah	7.883.344.201	7.199.489.082	9,50

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,50 persen dari 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Kenaikan gaji pegawai tahun 2024 sebesar 8% dan tunjangan PNS dan PPPK mengalami kenaikan yang berasal dari kenaikan gaji pokok dan tunjangan bagi pegawai yang naik pangkat dan sejenisnya.
- Pengembalian belanja senilai Rp10.041.664 dapat rinci sbb :
  - Kelebihan pembayaran tunj. Fungsional untuk bulan september 2023 s.d Februari 2024 untuk 1 orang pegawai senilai Rp4.650.000
  - Kelebihan pembayaran tunj. Fungsional untuk bulan september 2023 s.d Februari 2024 untuk 1 orang pegawai senilai Rp4.650.000
  - Kelebihan tunjangan umum pegawai yang telah pindah ke satker lain untuk 2 orag pegawai senilai Rp740.150
  - Pengembalian tunjangan pajak senilai Rp1.514

*Belanja Barang*  
Rp3.753.556.602

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.753.556.602 dan Rp9.668.232.164.

*Tabel 10*  
*Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	254.276.930	384.661.613	(33,90)
Belanja Barang Non Operasional	184.821.621	2.777.101.929	(93,34)



Belanja Barang Persediaan	512.083.800	741.866.782	(30,97)
Belanja Jasa	1.272.135.133	1.434.549.576	(11,32)
Belanja Pemeliharaan	408.864.179	442.602.203	(7,62)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.121.574.969	3.887.450.061	(71,15)
Jumlah Bruto	3.753.756.632	9.668.232.164	(61,17)
Pengembalian Belanja	200.030	0	0,00
Jumlah	3.753.556.602	9.668.232.164	(61,18)

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (61,18) persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat Sensus Pertanian (ST2023) dengan anggaran yang cukup besar dibanding tahun ini, selain itu, pada tahun 2024 terdapat penghematan anggaran yang dilakukan BPS antara lain Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Perjalanan Dalam Negeri.

Pengembalian belanja barang dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembalian kelebihan transport peserta pelatihan SINASI tahun 2024 senilai Rp49.100
- Pengembalian denda pajak kendaraan dinas roda-2 Tahun 2024 senilai Rp9.130
- Pengembalian denda pajak kendaraan dinas roda-4 Tahun 2024 senilai Rp74.800
- Pengembalian kelebihan transport bandara surabaya dalam rangka bancmarketing tahun 2024 senilai Rp67.000

*Belanja Modal*  
*Rp489.715.000*

#### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp489.715.000 dan Rp196.367.500. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



*Tabel 11*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	397.514.000	196.367.500	102,43
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.201.000	0	0,00
Jumlah Bruto	489.715.000	196.367.500	149,39
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>489.715.000</b>	<b>196.367.500</b>	<b>149,39</b>

Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan pada 31 Desember 2024 sebesar 149,39 persen dibandingkan 31 Desember 2023 disebabkan oleh

Adanya belanja modal gedung dan bangunan pada periode ini berupa Penataan Ruang PST BPS Provinsi Gorontalo TA 2024 sebesar Rp.92.201.000, sedangkan untuk belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp397.514.000 merupakan pengadaan peralatan dan mesin antara lain alat ubinan dan laptop.

#### **B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp397.514.000 dan Rp196.367.500.

*Tabel 12*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	397.514.000	196.367.500	102,43
Jumlah Bruto	397.514.000	196.367.500	102,43
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>397.514.000</b>	<b>196.367.500</b>	<b>102,43</b>



Realisasi tersebut pada 31 Desember 2024, mengalami kenaikan sebesar 102,43 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023 sebesar Rp196.367.500.

Penambahan peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

- Pengadaan meubelair ruang PST antara lain meja, kursi, loker dsb senilai Rp74.925.000
- Pengadaan alat studio senilai Rp24.000.000
- Pengadaan printer senilai Rp2.697.000
- Pengadaan laptop senilai Rp124.500.000
- Pengadaan lemari es (kulkas laktasi) senilai Rp5.000.000
- Pengadaan alat ubinan senilai Rp166.392.000

#### **B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebesar Rp92.201.000.

*Tabel 13*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

<b>Uraian Jenis Belanja</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2024(Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	92.201.000	0	0,00
Jumlah Bruto	92.201.000	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>92.201.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Kenaikan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 100 persen tersebut dikarenakan adanya Pengadaan Penataan Ruang PST BPS Provinsi Gorontalo TA 2024 senilai Rp92.201.000.



## C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan  
Rp151.726.883

### C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp151.726.883 dan Rp215.629.620. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 14  
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Barang Konsumsi	151.726.883	215.552.720
Bahan untuk Pemeliharaan	0	76.900
<b>Jumlah</b>	<b>151.726.883</b>	<b>215.629.620</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan persediaan per 31 Desember 2023. Hal ini karena pada tahun 2023 terdapat barang persediaan untuk kegiatan FKP Regsosek, ST2023, PL-KUMKM dan kuesioner survei rutin BPS.

Selain itu, untuk belanja barang pemeliharaan tidak terdapat pada periode ini dibanding periode sebelumnya.

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2024 di jelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>215.629.620</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Pembelian	512.083.800
Transfer Masuk	41.750.356
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>553.834.156</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Habis Pakai	(245.861.617)
Transfer Keluar	(371.809.446)
Usang	(65.830)



<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<u>(617.736.893)</u>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<u>(63.902.737)</u>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024</b>	<b>151.726.883</b>

- Mutasi tambah berasal dari pembelian ATK dan komputer supplies serta pengadaan pencetakan kuesioner dan buku pedoman survei penunjang kegiatan lapangan.
- Transfer masuk persediaan berasal dari BPS RI berupa kuesioner, buka pedomans serta dokumen pencacahan untuk menunjang kegiatan perkantoran maupun lapangan dalam pelaksanaan survei di BPS Provinsi maupun BPS Kab/Kota.
- Transfer keluar berupa kuesioner, buka pedomans serta dokumen pencacahan untuk menunjang kegiatan perkantoran maupun lapangan dalam pelaksanaan survei di BPS Provinsi maupun BPS Kab/Kota.
- Mutasi kurang habis pakai merupakan penggunaan ATK dan komputer supplies yang digunakan untuk menunjang kegiatan perkantoran. Selain itu kuesioner dan dokumen untuk penunjang kegiatan lapangan diserahkan kepada pelaku survei di lapangan.
- Nilai persediaan yang telah usang

Transfer keluar merupakan transfer perlengkapan lapangan dari BPS Provinsi ke BPS Kab/Kota berupa kuesioner, buku pedoman dan bahan kegiatan survei serta peralatan survei.

*Tanah*  
*Rp4.861.957.000*

### **C.2 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.861.957.000 dan Rp4.861.957.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>4.861.957.000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<u>0</u>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<u>0</u>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<u>0</u>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024</b>	<b>4.861.957.000</b>



Aset berupa Tanah yang dikuasai BPS Provinsi Gorontalo yaitu terletak di Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango dengan rincian :

- Luas Tanah Bangunan Gedung Kantor adalah 2,382 M2 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon II adalah 392 M2 yang terletak di Jl. Brigjen Piola Isa, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon III adalah 2.050 M2 terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

Sampai dengan periode 31 Desember 2024 tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai tanah pada satker BPS Provinsi Gorontalo karena revaluasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah oleh KPKNL dilaksanakan pada tahun 2017. Semua tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Tidak adanya mutasi tanah pada periode ini sedangkan segala permasalahan baik sengketa, bukti kepemilikan, dikuasai pihak lain maupun penghentian dari penggunaan tidak terdapat pada periode ini.

*Peralatan dan Mesin*  
*Rp14.031.382.933*

### **C.3 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp14.031.382.933 dan Rp14.196.157.633. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>14.196.157.633</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Pembelian	314.318.000
Transfer Masuk	23.400.000
Reklasifikasi Masuk	58.350.000
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>396.068.000</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Transfer Keluar	(271.588.500)
Reklasifikasi Keluar	(58.350.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(230.904.200)



<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>(560.842.700)</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>(164.774.700)</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024</b>	<b>14.031.382.933</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024</b>	<b>(13.507.474.212)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2024</b>	<b>523.908.721</b>

Mutasi Tambah :

- Berasal dari pembelian sampai dengan per 31 Desember 2024 adalah berupa :
  - Pengadaan meubelair ruang PST antara lain meja, kursi, loker dsb senilai Rp74.925.000
  - Pengadaan alat studio senilai Rp24.000.000
  - Pengadaan printer senilai Rp2.697.000
  - Pengadaan laptop senilai Rp124.500.000
  - Pengadaan lemari es (kulkas laktasi) senilai Rp5.000.000
  - Pengadaan alat ubinan yang masuk dalam transaksi RPATA senilai Rp83.196.000
- Transfer masuk sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp23,400,000 adalah merupakan 1 unit kendaraan dinas roda 2 yang berasal dari BPS Kota Gorontalo.
- Reklasifikasi masuk sebesar Rp58,350,000 adalah berupa LCD Projector/Infocus dan A.C. Split

Mutasi Kurang :

- Transfer Keluar sampai dengan per 31 Desember 2024 sebesar (271.588.500) yaitu berupa :
  - 1 Unit kendaraan dinas roda 4 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )senilai Rp(244,785,500)
  - 1 unit Sepeda Motor senilai Rp(16,903,000)
  - 1 unit Sice senilai Rp(9,900,000)
- Reklasifikasi keluar sebesar Rp58,350,000 adalah berupa LCD Projector/Infocus senilai Rp35.100.000 dan A.C. Split senilai Rp23,250,000
- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp(230,904,200) adalah berupa alat angkutan darat bermotor yaitu 15 unit kendaraan dinas roda 2 senilai Rp230.904.200



*Gedung dan  
Bangunan  
Rp18.159.563.000*

#### **C.4 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp18.159.563.000 dan Rp18.067.362.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>		<b>18.067.362.000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>		
Pembelian	92.201.000	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	92.201.000	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>184.402.000</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>		
Koreksi Pencatatan	(-92.201.000)	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>(92.201.000)</b>	
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>		<b>92.201.000</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024</b>		<b>18.159.563.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024</b>		<b>(3.188.462.805)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2024</b>		<b>14.971.100.195</b>

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan pada periode pelaporan adalah Penataan Ruang PST BPS Provinsi Gorontalo TA 2024 senilai Rp92.201.000.

*Aset Tetap Lainnya  
Rp300.092.863*

#### **C.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp300.092.863 dan Rp300.092.863. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:



<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>		<b>300.092.863</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>		
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<u>0</u>	
<b>Mutasi Kurang :</b>		
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<u>0</u>	
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>		<u>0</u>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024</b>		<b>300.092.863</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024</b>		<b>0</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2024</b>		<b>300.092.863</b>

Sampai dengan periode 31 Desember 2024 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset tetap lainnya sehingga nilai aset tetap lainnya masih sama dengan nilai periode sebelumnya.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp16.695.937.017*

#### **C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp16.695.937.017 dan Rp16.542.183.075. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024*

<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Nilai Buku</b>
Peralatan dan Mesin	14.031.382.933	13.507.474.212	523.908.721
Gedung dan Bangunan	18.159.563.000	3.188.462.805	14.971.100.195
Aset Tetap Lainnya	300.092.863	0	300.092.863
<b>Jumlah</b>	<b>32.491.038.796</b>	<b>16.695.937.017</b>	<b>15.795.101.779</b>



Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud  
Rp1.663.672.500*

#### **C.7 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp1.663.672.500 dan Rp1.663.672.500. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 16  
Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2024*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai Perolehan</b>
Software	1.614.128.500
Lisensi	49.544.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.663.672.500</b>

**Daftar Aset Tak Berwujud berupa Software Per 31 Desember 2024 senilai Rp1.614.128.500 dengan rincian sebagai berikut :**

- 1 unit Kapow Versi 9.6 senilai Rp829.053.500
- 1 unit ArcGis Desktop Standard Concurrent Use senilai Rp178.750.000
- Microsoft SQLSvrStdCore Pengolahan SP2020 sebanyak 6 unit @Rp70.000.000 = Rp420.000.000
- Microsoft Officeproplus 2019 OLP NL GOV sebanyak 29 unit @6.425.000 = Rp186.325.000

**Daftar Aset Tak Berwujud berupa Lisensi Per 31 Desember 2024 senilai Rp49.544.000 rincian sebagai berikut :**

- Microsoft WinSvrStd LicSAPk OLP NL Gov 2 Proc (PN:P) 2 unit @15.422.000 = Rp30.844.000
- 1 Unit Sistem Operasi Server SKU Number P73-05819 senilai Rp18.700.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>1.663.672.500</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>0</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024</b>	<b>1.663.672.500</b>
<b>Akumulasi Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2024</b>	<b>(1.661.195.300)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2024</b>	<b>2.477.200</b>

Sesuai rincian diatas bahwa tidak ada perubahan nilai perolehan untuk aset tak berwujud pada pelaporan periode tahun ini dikarenakan tidak adanya penambahan maupun pengurangan pada periode ini sehingga nilai perolehan masih sama dengan periode sebelumnya.

*Dana yang Dibatasi Penggunaannya  
Rp166.392.000*

#### C.8 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp166.392.000 dan Rp0. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaan berasal dari dana di rekening penampungan Kementerian/Lembaga.

*Tabel*

*Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023(Rp)</b>
Jumlah	166.392.000	0

Dana yang Dibatasi Penggunaannya senilai Rp166.392.000 merupakan transaksi RPATA pengadaan alat ubinan tahun 2024 yang masuk dalam rekening penampungan kementerian keuangan yang dicairkan apabila barang tersebut telah diterima oleh satker. Alat ubinan tersebut telah dilakukan perikatan kontrak tahun 2024 tetapi pada akhir batas pembayaran akhir tahun barang tersebut belum diterima karena terkendala pada pengiriman.



*Aset Lain-lain*  
*Rp14.380.727*

### **C.9 Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp14.380.727 dan Rp115.056.727. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>		<b>115.056.727</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>		
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	230.904.200	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>230.904.200</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>		
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(331.580.200)	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>(331.580.200)</b>	
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>		<b>(100.676.000)</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024</b>		<b>14.380.727</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024</b>		<b>(13.995.692)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2024</b>		<b>385.035</b>

- Mutasi Tambah berupa Penghentiaan Aset Dari Penggunaan sebesar Rp230.904.200 berupa 15 unit kendaraan dinas roda 2
- Mutasi Kurang berupa Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp331.580.200 berupa :
  - Kendaraan dinas roda-4 Toyota Kijang 1 unit senilai Rp83.000.000
  - Kendaraan dinas roda-2 Honda Supra X sebanyak 13 unit @15.030.000 = Rp195.390.000
  - Kendaraan dinas roda-2 Yamaha Jupiter MX sebanyak 2 unit @17.757.100 = Rp35.514.200
  - Kendaraan dinas roda-2 Honda 1 unit senilai @17.676.000

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.



*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp1.675.190.992*

### **C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp1.675.190.992 dan Rp1.770.912.592. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 17  
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</b>	<b>Nilai Buku</b>
Software	1.614.128.500	1.614.128.500	0
Lisensi	49.544.000	47.066.800	2.477.200
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	14.380.727	13.995.692	385.035
<b>Jumlah</b>	<b>1.678.053.227</b>	<b>1.675.190.992</b>	<b>2.862.235</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp375.994.474*

### **C.11 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp375.994.474 dan Rp276.913.478. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Provinsi Gorontalo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



*Tabel 18*  
*Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2024 dan 2023*

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	291.750.227	275.970.153
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.048.247	943.325
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	83.196.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>375.994.474</b>	<b>276.913.478</b>

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 sejumlah Rp291.750.227, berupa :

- Tunjangan Kinerja pegawai bulan Desember 2024 sebesar Rp.260.056.428;
- Tunjangan PPh PNS bulan Desember 2024 sebesar Rp13.772.184;
- Tunjangan kinerja PPPK bulan Desember 2024 sebesar Rp7.968.615;
- Dan Uang makan pegawai bulan Desember 2024 sebesar Rp9.953.000.

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.048.247 merupakan :

- Belanja Langganan Air Kantor BPS Provinsi Gorontalo Desember 2024 sebesar Rp970.297
- Belanja Langganan Air Rumah Dinas BPS Provinsi Gorontalo Desember 2024 sebesar Rp 77.950.

Utang kepada pihak ketiga lainnya adalah alat ubinan sebesar Rp83.196.000 yang tercatat pada transaksi RPATA. Pada periode 31 Desember 2024 Alat ubinan masih dalam proses pengiriman sehingga pada SAKTI menjadi 50% BAPP dianggap barang tersebut telah bergerak menuju tempat tujuan.

*Ekuitas*  
*Rp20.602.045.423*

#### **C.12 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.602.045.423 dan Rp20.829.919.198. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.



Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah Aset dikurangi Kewajiban :

Aset	Rp20.978.039.897
Kewajiban	(Rp375.994.474)
Ekuitas	Rp20.602.045.423

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBPNP*  
*Rp18.964.622*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.964.622 dan Rp3.514.098.492. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 19*  
*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik(Turun)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	18.018.292	6.521.450	176,29
Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	3.506.730.000	(100,00)
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	946.330	847.042	11,72
<b>Jumlah</b>	<b>18.964.622</b>	<b>3.514.098.492</b>	<b>(99,46)</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan periode 31 Desember 2024 yang berasal dari :

- Sewa tanah gedung dan bangunan mengalami kenaikan dibanding tahun lalu dikarenakan tahun ini seluruh rumah dinas negara telah dihuni dan membayarkan sewa rumah negara sesuai dengan tarif masing-masing secara teratur selama 12 bulan senilai Rp18.018.292. Jumlah ini sudah termasuk kekurangan tarif sewa rumah dinas tahun 2023.



- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan dengan nilai Rp946.330 berasal dari Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi.

*Tabel 20*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2024*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	18.018.292	18.018.292	0
Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	0	0
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	946.330	946.330	0
<b>Jumlah</b>	<b>18.964.622</b>	<b>18.964.622</b>	<b>0</b>

Tidak terdapat selisih antara nilai LO dan LRA pada pendapatan negara bukan pajak sampai dengan per 31 Desember 2024.

*Beban Pegawai*    **D.2 Beban Pegawai**  
*Rp7.899.124.275*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.899.124.275 dan Rp7.205.124.869. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 21*  
*Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik(Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	2.581.650.515	2.342.410.367	10,21
Beban Pembulatan Gaji PNS	36.920	38.326	(3,67)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	149.164.620	143.256.610	4,12
Beban Tunj. Anak PNS	41.398.574	38.245.590	8,24
Beban Tunj. Struktural PNS	63.140.000	63.140.000	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	416.760.000	383.074.000	8,79
Beban Tunj. PPh PNS	271.248.484	10.613.659	2.455,65
Beban Tunj. Beras PNS	120.072.360	119.637.840	0,36
Beban Uang Makan PNS	363.345.000	317.379.000	14,48
Beban Tunjangan Umum PNS	21.574.850	33.919.870	(36,39)



Beban Gaji Pokok PPPK	79.156.000	14.832.500	433,67
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.898	480	295,42
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.430.560	0	0,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.372.224	0	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	11.760.000	2.700.000	335,56
Beban Tunjangan Beras PPPK	4.490.040	362.100	1.140,00
Beban Uang Makan PPPK	13.904.000	1.850.000	651,57
Beban Uang Lembur	63.175.000	74.618.000	(15,34)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.587.065.217	3.645.928.583	(1,61)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	106.378.013	13.117.944	710,94
<b>Jumlah</b>	<b>7.899.124.275</b>	<b>7.205.124.869</b>	<b>9,63</b>

Kenaikan beban pegawai dari periode 2024 ke periode 2023 senilai 9,63% disebabkan oleh :

- Penambahan pegawai yang dimutasi dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi, sehingga beban gaji pokok dan tunjangan penyertanya ikut naik
- Penambahan 1 Orang PPPK yang merupakan penerimaan tahun 2024 sehingga gaji dan tunjangan kinerja PPPK mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
- Penyesuaian tarif TER (tarif efektif rata-rata) terhadap tunjangan pajak penghasilan PNS yang berlaku dari bulan juli 2024
- Tunjangan fungsional pegawai yang telah diangkat pada pejabat fungsional statistisi serta kenaikan jenjang fungsional dari pertama ke muda serta muda ke madya.

*Tabel 22*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31*  
*Desember 2024*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	2.581.650.515	2.585.993.092	(4.342.577)
Beban Pembulatan Gaji PNS	36.920	36.920	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	149.164.620	149.164.620	0
Beban Tunj. Anak PNS	41.398.574	41.398.574	0
Beban Tunj. Struktural PNS	63.140.000	63.140.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	416.760.000	416.760.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	271.248.484	257.476.300	13.772.184
Beban Tunj. Beras PNS	120.072.360	120.072.360	0
Beban Uang Makan PNS	363.345.000	354.021.000	9.324.000
Beban Tunjangan Umum PNS	21.574.850	21.574.850	0
Beban Gaji Pokok PPPK	79.156.000	79.156.000	0



Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.898	1.898	0
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.430.560	3.430.560	0
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.372.224	1.372.224	0
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	11.760.000	11.760.000	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	4.490.040	4.490.040	0
Beban Uang Makan PPPK	13.904.000	13.904.000	0
Beban Uang Lembur	63.175.000	63.175.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.587.065.217	3.598.007.365	(10.942.148)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	106.378.013	98.409.398	7.968.615
<b>Jumlah</b>	<b>7.899.124.275</b>	<b>7.883.344.201</b>	<b>15.780.074</b>

Selisih yang timbul antara LO dan LRA ditimbulkan oleh belanja pegawai yang masih dibayarkan, hal ini merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan pada bulan selanjutnya tetapi Surat Perintah Membayar dibuatkan pada bulan berkenaan. Nilai LO merupakan nilai seluruh permintaan anggaran yang dibuatkan SPM sedangkan LRA merupakan nilai yang sudah menjadi SP2d.

Terlihat pada tabel untuk belanja pegawai dengan nilai positif berupa beban bulan Desember 2024 dengan SPM dibuat pada bulan Januari 2025, sedangkan beban tunjangan khusus dan beban gaji pokok dengan nilai negatif merupakan tunjangan desember 2024 yang masuk dalam realisasi Januari 2025.

Selisih Nilai LO dan LRA pada Beban Belanja Pegawai berupa :

- Beban Gaji Pokok PNS senilai Rp4.342.577 merupakan gaji susulan pegawai pindahan bulan desember 2023 yang dibayarkan pada januari 2024 setelah menerima SKPP yang disetujui oleh KPPN.
- Beban Tunj. PPh PNS senilai Rp13.772.184 merupakan penyesuaian tarif PPh TER untuk seluruh pegawai yang disesuaikan pada bulan desember 2024.
- Beban Uang Makan PNS senilai Rp9.324.000 merupakan selisih antara beban uang makan desember 2024 yang dibayarkan januari 2025 senilai Rp9.953.000 dikurangi beban uang makan desember 2023 yang dibayarkan januari 2024 senilai Rp629.000
- Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) senilai (Rp10.942.148) merupakan selisih antara pembayaran tukin desember 2024 yang dibayar januari 2025 senilai Rp260.056.428 dikurangi tukin desember 2023 yang dibayarkan januari 2024 senilai Rp270.998.570
- Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK senilai Rp7.968.615 merupakan tunjangan kinerja PPPK bulan desember 2024 yang dibayarkan bulan januari 2025.



*Beban Persediaan*  
*Rp245.784.717*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp245.784.717 dan Rp466.462.329. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 23*  
*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>Naik(Turun)%</b>
Beban Persediaan konsumsi	245.784.717	466.462.329	(47,31)
<b>Jumlah</b>	<b>245.784.717</b>	<b>466.462.329</b>	<b>(47,31)</b>

Penurunan beban persediaan pada periode ini dikarenakan berkurangnya volume kegiatan lapangan dibanding tahun 2023 yang melibatkan belanja persediaan seperti kuesioner dan buku pedoman. Kegiatan tahun 2023 berupa Sensus Pertanian 2023 (ST2023), Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PL-KUMKM) yang memerlukan persediaan yang cukup besar.

*Beban Barang dan Jasa*  
*Rp1.710.409.846*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.710.409.846 dan Rp4.596.479.743. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Tabel 24*  
*Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>Naik(Turun)%</b>
Beban Keperluan Perkantoran	124.938.670	255.602.613	(51,12)



Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65.464.000	124.380.000	(47,37)
Beban Barang Operasional Lainnya	62.945.500	4.500.000	1.298,79
Beban Bahan	98.920.915	419.926.834	(76,44)
Beban Honor Output Kegiatan	25.673.000	2.318.765.880	(98,89)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	31.031.415	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	33.532.706	7.377.800	354,51
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	26.695.000	0	0,00
Beban Langganan Listrik	249.175.731	267.655.222	(6,90)
Beban Langganan Telepon	2.157.235	2.852.219	(24,37)
Beban Langganan Air	9.892.548	7.256.600	36,32
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	113.240.161	0	0,00
Beban Sewa	850.000	17.982.000	(95,27)
Beban Jasa Profesi	23.500.000	73.100.000	(67,85)
Beban Jasa Lainnya	873.424.380	1.066.049.160	(18,07)
<b>Jumlah</b>	<b>1.710.409.846</b>	<b>4.596.479.743</b>	<b>(62,79)</b>

Beban belanja barang dan jasa mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 terdapat kegiatan besar berupa Sensus Pertanian 2023 (ST2023), Forum konsultasi publik dalam rangka tindak lanjut Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PL-KUMKM). Rangkaian kegiatan ini mempengaruhi hampir seluruh kegiatan belanja barang dan jasa baik beban honor output kegiatan yang dibayarkan pada seluruh petugas sensus, beban barang non operasional lainnya serta beban jasa lainnya. Sedangkan untuk periode ini hanya terdapat survey-survey rutin yang biasa dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.



*Tabel 25*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31*  
*Desember 2024*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai LO</b>	<b>Nilai LRA</b>	<b>Selisih</b>
Beban Keperluan Perkantoran	124.938.670	125.783.500	(844.830)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65.464.000	65.464.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	62.945.500	62.945.500	0
Beban Bahan	98.920.915	98.920.915	0
Beban Honor Output Kegiatan	25.673.000	25.673.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	33.532.706	33.532.706	0
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	26.695.000	26.695.000	0
Beban Langganan Listrik	249.175.731	249.175.731	0
Beban Langganan Telepon	2.157.235	2.157.235	0
Beban Langganan Air	9.892.548	9.787.626	104.922
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	113.240.161	113.240.161	0
Beban Sewa	850.000	850.000	0
Beban Jasa Profesi	23.500.000	23.500.000	0
Beban Jasa Lainnya	873.424.380	873.424.380	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.710.409.846</b>	<b>1.711.149.754</b>	<b>(739.908)</b>

Selisih Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa senilai Rp739.908 berasal dari :

- Beban keperluan barang dan jasa senilai Rp844.830 yang merupakan kesalahan pembebanan akun yang pada LRA masuk pada pemeliharaan kendaraan dinas tetapi pada LO masih dibaca pada keperluan perkantoran.
- Beban langgan air senilai Rp104.922 yang berasal dari selisih antara tagihan air Desember 2024 yang dibayarkan Januari 2025 Rp1.048.247 dikurangi tagihan air Desember 2023 dibayarkan Januari 2024 senilai Rp943.325.



#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp409.785.909 dan Rp451.386.203. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 26  
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	191.065.878	115.073.200	66,04
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	218.643.131	327.529.003	(33,24)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	76.900	8.784.000	(99,12)
Jumlah	409.785.909	451.386.203	(9,22)

Sampai dengan periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan 9,22% yang disebabkan oleh :

- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan naik sebesar 66,04% dibanding periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat rehabilitasi toilet untuk penyandang Disabilitas, Perbaikan halaman parkir untuk tamu dan penyandang Disabilitas, serta adanya pergantian keramik yang sudah mulai retak.
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan dikarenakan sejak Januari 2024 seluruh kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 sudah tidak digunakan lagi atau sudah ditarik dari pegawai pemegang kendaraan dinas.
- Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan tidak digunakan lagi dibanding tahun sebelumnya.



*Tabel 27*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31*  
*Desember 2024*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	191.065.878	191.065.878	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	218.643.131	217.798.301	844.830
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	76.900	0	76.900
Jumlah	409.785.909	408.864.179	921.730

Beban pemeliharaan senilai Rp76.900 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Selisih Nilai LO dan LRA belanja pemeliharaan senilai RP921.730 berasal dari :

- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp844.830 merupakan pengembalian kelebihan pajak kendaraan dinas yang mengurangi LRA sedangkan di LO tidak, selain itu adanya kesalahan pembebanan pada LRA sudah diperbaiki hanya saja pada LO belum diakui.
- Beban pemeliharaan senilai Rp76.900 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

*Beban Perjalanan Dinas*  
*Rp1.121.458.869*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.121.458.869 dan Rp3.887.450.061. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.



*Tabel 28*  
*Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	320.753.016	757.806.630	(57,67)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.534.703	74.727.000	(91,26)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	750.160.475	2.595.672.361	(71,10)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44.010.675	459.244.070	(90,42)
<b>Jumlah</b>	<b>1.121.458.869</b>	<b>3.887.450.061</b>	<b>(71,15)</b>

Penurunan yang cukup tinggi dari beban perjalanan dinas pada periode 31 Desember 2024 dikarenakan pada periode ini tidak terdapat perjalanan dinas dalam dan luar kota serta paket meeting dalam kota maupun luar kota yang dilakukan untuk menunjang kegiatan teknis maupun administrasi. Adanya kegiatan pelatihan petugas, pengawasan lapangan, rapat koordinasi pada Sensus Pertanian 2023 (ST2023), Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PL-KUMKM) tahun 2023 yang dilakukan secara tatap muka sedangkan pada tahun 2024 sebatas kegiatan rutin BPS.

*Tabel 29*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2024*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	320.753.016	320.753.016	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.534.703	6.534.703	0



Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	750.160.475	750.160.475	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44.010.675	44.010.675	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.121.458.869</b>	<b>1.121.458.869</b>	<b>0</b>

Tidak terdapat selisih LO dan LRA pada beban perjalanan dinas pada periode ini.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp636.595.079*

#### **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp636.595.079 dan Rp779.885.171. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Tabel 30  
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>Naik(Turun)%</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	235.652.608	282.789.348	(16,67)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	395.988.071	394.007.048	0,50
Beban Amortisasi Software	0	98.134.375	(100,00)
Beban Amortisasi Lisensi	4.954.400	4.954.400	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>636.595.079</b>	<b>779.885.171</b>	<b>(18,37)</b>

Seperti terlihat pada tabel diatas Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (18,37) persen yang meliputi Beban Penyusutan



Peralatan dan Mesin sebesar (16,67) persen dan Beban Amortisasi Software sebesar (100,00) persen.

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp92.338.420

#### D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31  
Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik(Turun)%
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	92.404.250	0	0,00
<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	8.866.970	(100,00)
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Beban Persediaan Rusak/Usang	65.830	36.097.698	(99,82)
<b>Jumlah</b>	<b>92.338.420</b>	<b>(44.964.668)</b>	<b>(305,36)</b>

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya terdapat Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp92.404.250, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil penjualan lelang BMN yang dilakukan pada bulan mei 2024 dan juni 2024, disamping itu terdapat Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp65.830,-

Rincian lelang periode 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- Lelang inventaris kantor berupa laptop, printer, ac split, ploter, serial lainnya (publikasi) dan UPS sesuai Risalah Lelang Nomor 171/16.02/2024-01 tanggal 28 Mei 2024 dengan nilai Rp7.069.250,-
- Lelang kendaraan dinas roda 2 dan 4 dan peralatan vicon (terminal) sesuai Risalah Lelang Nomor 236/16.02/2024-01 tanggal 12 Juli 2024 dengan niai Rp85.335.000,-



## E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp20.829.919.198*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.829.919.198 dan Rp21.862.708.638.

*Defisit LO*  
*Rp11.911.855.653*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.911.855.653 dan Rp13.917.654.552. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Berkurangnya nilai defisit tahun 2024 dibanding tahun 2023 dikarenakan kegiatan lapangan tahun 2024 sedikit berkurang dibanding tahun 2023. Tahun ini kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan rutin BPS secara nasional sedangkan tahun 2023 terdapat kegiatan Sensus Pertanian (ST2023), Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pendataan Lapangan UMKM.

### E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar minus Rp9.563.105 dan Rp0. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

*Tabel 32*  
*Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023(Rp)</b>
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(9.563.105)	0
<b>Jumlah</b>	<b>(9.563.105)</b>	<b>0</b>

Koreksi senilai (Rp9.563.105) berasal dari reklasifikasi keluar untuk kode peralatan dan mesin dari 1 unit AC Sentral ke 1 unit AC Split serta 1 unit Viewer ke 1 unit LCD Proyektor.

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi minus*  
*Rp9.563.105*

### E.3.1 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar minus



Rp9.563.105 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Tabel 33*  
*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024*

<b>Tabel Jenis Aset Tetap</b>	<b>Tabel Nilai Koreksi(Rp)</b>
Jumlah	(9.563.105)

\*) nilai minus pada tabel didefinisikan koreksi pada aset tersebut merupakan koreksi pengurangan

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp11.693.544.983*

#### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.693.544.983 dan Rp12.884.865.112. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Tabel 34*  
*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023(Rp)</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.126.615.803	17.064.088.746
Diterima dari Entitas Lain	(111.368.872)	(3.514.098.492)
Transfer Keluar	(371.809.446)	(721.678.464)
Transfer Masuk	50.107.498	56.553.322
Jumlah	11.693.544.983	12.884.865.112

Seperti terlihat pada tabel ini Transaksi Antar Entitas s.d. per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dari periode sebelumnya.

Adapaun Transaksi Antar Entitas pada Satker BPS Provinsi Gorontalo berupa :

- Ditagihkan ke Entitas lain yakni realisasi pada entitas itu sendiri dalam hal ini satker BPS Provinsi Gorontalo yang ditagihkan atau dimintakan ke BUN sebagai entitas lainnya



dalam bentuk pengajuan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Diterima dari Entitas lain merupakan pendapatan yang diterima oleh satker BPS Provinsi Gorontalo dari pihak lain berupa sewa rumah negara yang dibayarkan oleh penghuni rumah dinas dan pengembalian kelebihan pembayaran dari pegawai.
- Transfer Keluar merupakan pengiriman barang konsumsi berupa hasil cetakan dokumen survei serta peralatan dan mesin seperti peralatan IT ke satker BPS Kab/Kota se Provinsi Gorontalo.
- Transfer Masuk merupakan penerimaan barang konsumsi, peralatan dan mesin serta software dari satker Sestama berupa hasil cetakan dokumen survei serta peralatan dan mesin.

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar minus Rp111.368.872 sedangkan DKEL sebesar Rp12.126.615.803.

Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) merupakan Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp111.368.872 dengan rincian sebagai berikut :

- PNBPN berupa sewa rumah dinas eselon II dan III sebesar Rp18.018.292,-
- Pendapatan Dari Hasil Pemindahtanganan BMN berupa lelang BMN sebesar Rp92.404.250,- dengan rincian sbb :
  - Lelang inventaris kantor berupa laptop, printer, ac split, ploter, serial lainnya (publikasi) dan UPS sesuai Risalah Lelang Nomor 171/16.02/2024-01 tanggal 28 Mei 2024 dengan nilai Rp7.069.250,-
  - Lelang kendaraan dinas roda 2 dan 4 dan peralatan vicon (terminal) sesuai Risalah Lelang Nomor 236/16.02/2024-01 tanggal 12 Juli 2024 dengan nilai Rp85.335.000,-
- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan yakni penjualan data mikro senilai Rp946.330,-

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan Realisasi Anggaran sebesar Rp12.126.615.803 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai senilai Rp7.883.344.201
- Belanja Barang senilai Rp3.753.556.602



- Belanja Modal senilai Rp489.715.000

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp50.107.498. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp371.809.446.

*Tabel 35*  
*Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2024*

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
Jumlah		0	0	0

Rincian Transfer Masuk.d 31 Desember 2024

NO	ENTITAS ASAL	JENIS	NILAI
1	BPS RI	Kalender Dinding, kalender Meja, Buku Kerja 2024	14,881,787
2	BPS RI	Kuesioner Survei Konstruksi	570,954
3	BPS RI	Kuesioner Survei Tanaman Pangan & Ubinan	2,181,675
4	BPS RI	Kuesioner Survei Perkebunan	846,940
5	BPS RI	Kalender Dinding, kalender Meja, Buku Kerja 2025	23,269,000
<b>TOTAL</b>			<b>41,750,356</b>

*Tabel 36*  
*Rincian Transfer Keluar Per 31 Desember 2024*

Entitas Tujuan	Jenis	Aset Ditransfer	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
Jumlah		0	0	0

Rincian Transfer Keluar s.d 31 Desember 2024

NO	ENTITAS ASAL	JENIS	NILAI
1	BPS KAB GORONTALO	KALENDER DINDING, KALENDER MEJA, BUKU KERJA 2024	1,801,202



2	BPS BONE BOLANGO	KALENDER DINDING, KALENDER MEJA, BUKU KERJA 2024	1,894,546
3	BPS KOTA GORONTALO	KALENDER DINDING, KALENDER MEJA, BUKU KERJA 2024	1,684,051
4	BPS KAB POHUWATO	KALENDER DINDING, KALENDER MEJA, BUKU KERJA 2024	1,735,196
5	BPS KAB BOALEMO	KALENDER DINDING, KALENDER MEJA, BUKU KERJA 2024	1,713,200
6	BPS KAB GORONTALO UTARA	KALENDER DINDING, KALENDER MEJA, BUKU KERJA 2024	1,718,542
7	BPS KAB POHUWATO	KUESIONER SURVEI KONSTRUKSI	43,477
8	BPS KAB BOALEMO	KUESIONER SURVEI KONSTRUKSI	58,065
9	BPS KAB GORONTALO UTARA	KUESIONER SURVEI KONSTRUKSI	58,065
10	BPS KAB GORONTALO	KUESIONER SURVEI KONSTRUKSI	149,949
11	BPS KAB BONE BOLANGO	KUESIONER SURVEI KONSTRUKSI	85,933
12	BPS KOTA GORONTALO	KUESIONER SURVEI KONSTRUKSI	175,465
13	BPS KAB POHUWATO	BUKU PEDOMAN, KUESIONER HARGA PRODUSEN, HARGA PERDESAAN 2024	2,435,828
14	BPS KAB BOALEMO	BUKU PEDOMAN, KUESIONER HARGA PRODUSEN, HARGA PERDESAAN 2024	2,281,135
15	BPS KAB GORONTALO UTARA	BUKU PEDOMAN, KUESIONER HARGA PRODUSEN, HARGA PERDESAAN 2024	2,800,136
16	BPS KAB GORONTALO	BUKU PEDOMAN, KUESIONER HARGA PRODUSEN, HARGA PERDESAAN 2024	3,442,249
17	BPS KAB BONE BOLANGO	BUKU PEDOMAN, KUESIONER HARGA PRODUSEN, HARGA PERDESAAN 2024	1,972,047
18	BPS KOTA GORONTALO	BUKU PEDOMAN, KUESIONER HARGA PRODUSEN, HARGA PERDESAAN 2024	1,246,026



19	BPS KAB POHUWATO	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN & PERKEBUNAN 2023	487,155
20	BPS KAB BOALEMO	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN & PERKEBUNAN 2023	342,855
21	BPS KAB GORONTALO UTARA	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN & PERKEBUNAN 2023	398,655
22	BPS KAB GORONTALO	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN & PERKEBUNAN 2023	610,855
23	BPS KAB BONE BOLANGO	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN & PERKEBUNAN 2023	471,150
24	BPS KOTA GORONTALO	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN & PERKEBUNAN 2023	260,050
25	BPS KAB POHUWATO	KUESIONER SERUTI	615,756
26	BPS KAB BOALEMO	KUESIONER SERUTI	615,756
27	BPS KAB GORONTALO UTARA	KUESIONER SERUTI	566,674
28	BPS KAB GORONTALO	KUESIONER SERUTI	771,926
29	BPS KAB BONE BOLANGO	KUESIONER SERUTI	669,300
30	BPS KOTA GORONTALO	KUESIONER SERUTI	668,588
31	BPS KAB POHUWATO	SURVEI EKONOMI PERTANIAN (SEP)	2,499,536
32	BPS KAB BOALEMO	SURVEI EKONOMI PERTANIAN (SEP)	3,927,055
33	BPS KAB GORONTALO UTARA	SURVEI EKONOMI PERTANIAN (SEP)	5,379,997
34	BPS KAB GORONTALO	SURVEI EKONOMI PERTANIAN (SEP)	7,784,006
35	BPS KAB BONE BOLANGO	SURVEI EKONOMI PERTANIAN (SEP)	3,335,600
36	BPS KOTA GORONTALO	SURVEI EKONOMI PERTANIAN (SEP)	580,854
37	BPS KOTA GORONTALO	KUESIONER SURVEI IBS TAHUNAN (STPIM) 2024	99,900
38	BPS KAB BONE BOLANGO	KUESIONER SURVEI IBS TAHUNAN (STPIM) 2024	33,300
39	BPS KAB GORONTALO	KUESIONER SURVEI IBS TAHUNAN (STPIM) 2024	173,100
40	BPS KAB BOALEMO	KUESIONER SURVEI IBS TAHUNAN (STPIM) 2024	33,300
41	BPS KAB POHUWATO	KUESIONER SURVEI IBS TAHUNAN (STPIM) 2024	20,200
42	BPS KAB POHUWATO	KUESIONER SURVEI STATISTIK KEUANGAN 2024	272,134



43	BPS KAB BOALEMO	KUESIONER SURVEI STATISTIK KEUANGAN 2024	411,108
44	BPS KAB GORONTALO UTARA	KUESIONER SURVEI STATISTIK KEUANGAN 2024	311,241
45	BPS KAB GORONTALO	KUESIONER SURVEI STATISTIK KEUANGAN 2024	715,140
46	BPS KAB BONE BOLANGO	KUESIONER SURVEI STATISTIK KEUANGAN 2024	375,256
47	BPS KOTA GORONTALO	KUESIONER SURVEI STATISTIK KEUANGAN 2024	434,121
48	BPS KAB POHUWATO	KUESIONER SUSENAS 2024	13,541,112
49	BPS KAB BOALEMO	KUESIONER SUSENAS 2024	13,654,332
50	BPS KAB GORONTALO UTARA	KUESIONER SUSENAS 2024	13,269,384
51	BPS KAB GORONTALO	KUESIONER SUSENAS 2024	16,416,900
52	BPS KAB BOLANGO	KUESIONER SUSENAS 2024	13,993,992
53	BPS KOTA GORONTALO	KUESIONER SUSENAS 2024	13,993,992
54	BPS KAB POHUWATO	KUESIONER SURVEI INDUSTRI MIKRO & KECIL (VIMK24)	969,622
55	BPS KAB BOALEMO	KUESIONER SURVEI INDUSTRI MIKRO & KECIL (VIMK24)	460,334
56	BPS KAB GORONTALO UTARA	KUESIONER SURVEI INDUSTRI MIKRO & KECIL (VIMK24)	925,022
57	BPS KAB GORONTALO	KUESIONER SURVEI INDUSTRI MIKRO & KECIL (VIMK24)	750,764
58	BPS KAB BONE BOLANGO	KUESIONER SURVEI INDUSTRI MIKRO & KECIL (VIMK24)	509,500
59	BPS KOTA GORONTALO	KUESIONER SURVEI INDUSTRI MIKRO & KECIL (VIMK24)	1,335,978
60	BPS KAB BOALEMO	KUESIONER SUSENAS MSBP & SERUTI 2024	5,768,328
61	BPS KAB POHUWATO	KUESIONER SUSENAS MSBP & SERUTI 2024	5,768,328
62	BPS KAB GORONTALO UTARA	KUESIONER SUSENAS MSBP & SERUTI 2024	5,287,634
63	BPS KAB GORONTALO	KUESIONER SUSENAS MSBP & SERUTI 2024	7,210,410
64	BPS KAB BONE BOLANGO	KUESIONER SUSENAS MSBP & SERUTI 2024	6,249,022
65	BPS KOTA GORONTALO	KUESIONER SUSENAS MSBP & SERUTI 2024	6,249,022
66	BPS KOTA GORONTALO	BOX ARSIP	4,390,000



67	BPS KAB BONE BOLANGO	BOX ARSIP	5,268,000
68	BPS KAB GORONTALO	BOX ARSIP	6,146,000
69	BPS KAB GORONTALO UTARA	BOX ARSIP	4,390,000
70	BPS KAB BOALEMO	BOX ARSIP	5,268,000
71	BPS KAB POHUWATO	BOX ARSIP	5,268,000
72	BPS KOTA GORONTALO	TOPI SENSUS PERTANIAN 2023 (untuk petugas KSA)	160,000
73	BPS KAB BONE BOLANGO	TOPI SENSUS PERTANIAN 2023 (untuk petugas KSA)	352,000
74	BPS KAB KAB GORONTALO	TOPI SENSUS PERTANIAN 2023 (untuk petugas KSA)	384,000
75	BPS KAB GORONTALO UTARA	TOPI SENSUS PERTANIAN 2023 (untuk petugas KSA)	448,000
76	BPS KAB BOALEMO	TOPI SENSUS PERTANIAN 2023 (untuk petugas KSA)	224,000
77	BPS KAB POHUWATO	TOPI SENSUS PERTANIAN 2023 (untuk petugas KSA)	416,000
78	BPS KOTA GORONTALO	KUESIONER SERUTI INTI TRIWULAN IV 2024	624,000
79	BPS KAB BONE BOLANGO	KUESIONER SERUTI INTI TRIWULAN IV 2024	624,000
80	BPS KAB GORONTALO	KUESIONER SERUTI INTI TRIWULAN IV 2024	720,000
81	BPS KAB GORONTALO UTARA	KUESIONER SERUTI INTI TRIWULAN IV 2024	528,000
82	BPS KAB BOALEMO	KUESIONER SERUTI INTI TRIWULAN IV 2024	576,000
83	BPS KAB POHUWATO	KUESIONER SERUTI INTI TRIWULAN IV 2024	576,000
84	BPS KAB POHUWATO	KUESIONER VSERUTI24. MAK	1,212,000
85	BPS KAB BOALEMO	KUESIONER VSERUTI24. MAK	1,212,000
86	BPS KAB GORONTALO UTARA	KUESIONER VSERUTI24. MAK	1,111,000
87	BPS KAB GORONTALO	KUESIONER VSERUTI24. MAK	1,515,000
88	BPS KAB BONE BOLANGO	KUESIONER VSERUTI24. MAK	1,313,000
89	BPS KOTA GORONTALO	KUESIONER VSERUTI24. MAK	1,313,000



90	BPS KAB POHUWATO	Kuesioner SUSENAS & SERUTI 2025	22,174,438
91	BPS KAB BOALEMO	Kuesioner SUSENAS & SERUTI 2025	22,174,438
92	BPS KAB GORONTALO UTARA	Kuesioner SUSENAS & SERUTI 2025	21,235,604
93	BPS KAB GORONTALO	Kuesioner SUSENAS & SERUTI 2025	27,115,548
94	BPS KAB BONE BOLANGO	Kuesioner SUSENAS & SERUTI 2025	22,681,450
95	BPS KOTA GORONTALO	Kuesioner SUSENAS & SERUTI 2025	23,381,262
96	BPS KAB POHUWATO	MAP ARSIP 2025	749,250
97	BPS KAB BOALEMO	MAP ARSIP 2025	749,250
98	BPS KAB GORONTALO	MAP ARSIP 2025	749,250
99	BPS KAB BONE BOLANGO	MAP ARSIP 2025	749,250
100	BPS KOTA GORONTALO	MAP ARSIP 2025	749,250
101	BPS KAB GORONTALO UTARA	MAP ARSIP 2025	749,100
<b>TOTAL</b>			<b>371,809,446</b>

*Ekuitas Akhir*  
*Rp20.602.045.423*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.602.045.423 dan Rp20.829.919.198.

Rincian Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah Aset dikurangi Kewajiban :

Aset	Rp20.978.039.897
Kewajiban	(Rp375.994.474)
Ekuitas	Rp20.602.045.423

## **F. PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 PENGUNGKAPAN REKENING DAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN**

- Bank Pemerintah yang digunakan BPS Provinsi Gorontalo adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gorontalo dengan rekening virtual dengan nomor dengan nomor 9890756369001000 atas nama BPg 050 BPS Provinsi Gorontalo dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp0,-
- Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik RI Nomor : 252/PA/2023 tanggal 18 Desember 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran BPS TA 2025 di Wilayah Provinsi Gorontalo.



- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Gorontalo No. SK No.1228001 Thn 2023 Tgl 29 Desember 2023 Tentang Pengelola Anggaran BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang berisi tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut : Mukhamad Mukhanif, S.Si, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Depit Rudianto, M.Ec.Dev sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Sity Defriani Djou, SE sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan Suciati Khusni Robi'ah sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Gorontalo No. SK No.0102002 Tahun 2025 Tgl 2 Januari 2025 Tentang Pengelola Anggaran BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang berisi tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut : Mukhamad Mukhanif, S.Si, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Sity Defriani Djou, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Dwi Alwi Astuti, SST, M.Ec.Dev. sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan Suciati Khusni Robi'ah sebagai Bendahara Pengeluaran.

## **F.2 PENGUNGKAPAN TRANSAKSI RPATA**

- Terdapat transaksi RPATA pengadaan alat ubinan tahun 2024 yang masuk dalam rekening penampungan kementerian keuangan yang dicairkan apabila barang tersebut telah diterima oleh satker. Alat ubinan tersebut telah dilakukan perikatan kontrak tahun 2024 tetapi pada akhir batas pembayaran akhir tahun barang tersebut belum diterima karena terkendala pada pengiriman.
- Transaksi RPATA telah dilakukan penihilan/atau pembayaran RPATA ke rekening penyedia pada tanggal 23 Januari 2025 sesuai dengan BAST yang telah diterima tanggal 20 Januari 2025. Proses pembayaran telah memperhitungkan denda keterlambatan barang sesuai dengan kontrak yang disepakati yakni 1/1000 dikalikan waktu keterlambatan. Secara rinci SPM pembayaran RPATA telah terlampir pada LK ini.

## **F. 3 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**

- Prioritas Nasional I - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diantaranya kegiatan prioritas yang tersebar di BPS Provinsi Gorontalo untuk program



PMTB, Sensus Ekonomi 2026, E-Commerce dan Sensus Pertanian dengan Total Pagu mencapai Rp959.529.000 dengan Realisasi sebesar Rp655.260.178 (68,29%)

- Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing meliputi kegiatan Statistik Tanaman Pangan dan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area dengan Total Pagu Rp209.554.000 dengan Realisasi senilai Rp201.219.500 (96,02%)
- Terdapat Efisiensi Anggaran (blokir pagu) pada Kegiatan Pronas sehingga Anggaran tidak dapat digunakan hingga periode 31 Desember 2024 berakhir, ini menyebabkan rendahnya realisasi hingga akhir tahun.
- Rincian Pagu dan Realisasi per Program Kegiatan serta Target dan Capaian telah dijelaskan secara rinci pada Pengungkapan Program Prioritas Nasional yang terlampir pada LK ini.

#### **F.4 PENGUNGKAPAN CAPAIAN OUTPUT SATKER TAHUN ANGGARAN 2024**

- Capaian Output satker dibuat per program PPIS dan Dukman
- Pada Belanja Program PPIS dengan Total Pagu Rp2.107.402.000 dan Realisasi Rp1.660.305.073 (78,78%)
- Pada Belanja Program Dukman Total Pagu Rp10.537.416.000 dan Realisasi Rp10.355.339.018 (98,27%)
- Terdapat Blokir Pagu Anggaran pada Program PPIS sehingga terlihat realisasi anggaran yang rendah pada PPIS
- Rincian Belanja Anggaran dan Realisasi serta Keluaran (Target dan Realisasi) telah dijelaskan secara rinci pada Laporan Kinerja Satker Tahun 2024 yang terlampir pada LK ini.

#### **F.5 PENGUNGKAPAN TINDAK LANJUR TEMUAN BPK**

Temuan BPK pada periode ini sudah ditindaklanjuti oleh seluruh satker di BPS yang langsung dikoordinasi oleh tim biro keuangan dan inspektorat dalam hal pemenuhan dan pengawalan sampai dengan penentuan hasil opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### **F.6 PENGUNGKAPAN REVISI DIPA DAN POK**

Uraian	Tanggal	Pagu Awal Jumlah	Pagu Revisi Jumlah	Penjelasan Revisi
--------	---------	------------------	--------------------	-------------------



DIPA I	18 Januari 2024	13,069,606,000	13,069,606,000	<p>Revisi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Utama BPS No. B-7/02000/PR.440/2024 tanggal 8 Januari 2024 terkait <i>automatic adjustment</i> belanja</p> <p>Kementerian/Lembaga TA 2024. Revisi ini menyebabkan adanya pemblokiran kegiatan dan anggaran pada Program PPIS sebesar Rp702.903.0000,-. Penyesuaian anggaran pada Revisi DIPA I ini tidak mengubah pagu anggaran, pagu tetap sebesar Rp13.069.606.000, -.</p>
POK I	16 Februari 2024	13,069,606,000	13,069,606,000	<p>Revisi POK I merupakan revisi dalam rangka tindak lanjut surat Direktur Statistik Industri No B-85/05300/VS.100/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencetakan Dokumen Survei Direktorat Statistik Industri 2024 dan sekaligus revisi POK kewenangan KPA untuk memenuhi kebutuhan belanja barang. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.069.606.000, -.</p>
DIPA II	20 Februari 2024	13,069,606,000	13,069,606,000	<p>Revisi DIPA II ini merupakan Revisi Kanwil DJPB dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan periode RPD Triwulan I sebagaimana tertuang dalam surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-0325/75000/PR.440/2024</p>



Tanggal 16 Februari 2024.  
Revisi ini tidak mengubah  
besaran pagu, pagu tetap  
sebesar Rp13.069.606.000, -

Revisi ini merupakan tindak  
lanjut dari Surat Sestama BPS  
RI Nomor: B-  
151/02000/PR.440/2024  
Tanggal 8 Maret 2024 untuk  
mengakomodir penyesuaian  
anggaran pada Program  
Dukman dan Program PPIS.  
Revisi ini menyebabkan  
penambahan pagu Dukman  
sebesar Rp338.943.000,-.  
Penambahan anggaran  
diperlukan dalam rangka  
belanja modal penataan PST  
sebesar Rp196.677.000,-.  
Penyelenggaran pleno EPSS  
senilai Rp110.046.000,- serta  
penambahan biaya untuk  
konsumsi rapat dalam rangka  
mendukung kegiatan teknis  
dan kegiatan rilis data BPS  
sebesar Rp32.220.000,-.

DIPA III	5 April 2024	13,069,606,000	13,109,362,000
----------	-----------------	----------------	----------------

Penyesuaian anggaran juga  
terdapat pada Program PPIS  
yang menyebabkan  
pengurangan anggaran sebesar  
Rp299.187.000,-. Penyesuaian  
meliputi realokasi anggaran  
antar kegiatan, penyesuaian  
dan realokasi anggaran  
*Automatic Adjustmen* dan  
realokasi anggaran antar satker  
sesuai dengan lokasi  
kegiatannya. Penyesuaian  
anggaran PPIS ini juga  
menyebabkan pagu blokir AA  
berkurang Rp17.608.000,-  
atau dari semula  
Rp702.903.000,- menjadi  
sebesar Rp685.295.000,-.



Secara total pagu anggaran bertambah sebesar Rp39.756.000,- atau total pagu menjadi sebesar Rp13.109.362.000,-.

DIPA IV	24 April 2024	13,109,362,000	13,109,362,000	Revisi DIPA III ini merupakan Revisi Kanwil DJPB dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan periode RPD Triwulan II sebagaimana tertuang dalam surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-0672/75000/PR.440/2024 Tanggal 19 April 2024. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.109.362.000, -.
POK II	22 Mei 2024	13,109,362,000	13,109,362,000	Revisi Satker II ini merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi undangan Sestama BPS No.: B-319/02000/PR.110/2024 tanggal 8 Mei 2024, Konreg PDRB Kasulampua di Sulawesi Barat dan revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.109.362.000, -.
DIPA V	3 Juni 2024	13,109,362,000	13,109,362,000	Revisi DIPA V ini merupakan Revisi Kanwil DJPB dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyesuaikan kembali rencana penarikan dana khususnya RPD mei dan juni dalam rangka memaksimalkan nilai IKPA sebagai tindak lanjut atas perubahan teknis penilaian



IKPA sesuai PER-5/PB/2024.

POK III	25 Juni 2024	13,109,362,000	13,109,362,000	Revisi ini sesuai dengan Surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-0942/75000/PR.440/2024 Tanggal 30 Mei 2024. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, baik pagu blokir maupun pagu total. Pagu tetap sebesar Rp13.109.362.000, -, Revisi Satker III ini merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan Evaluasi SHK, Evaluasi SEP dan revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.109.362.000, -. Revisi DIPA III ini merupakan Revisi Kanwil DJPB dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk periode RPD Triwulan III sebagaimana tertuang dalam surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-1285/75000/PR.440/2024 Tanggal 9 Juli 2024. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, baik pagu blokir <i>Automatic Adjustmen</i> maupun pagu total. Sehingga pagu blokir tetap sebesar Rp685.295.000,- dan pagu total tetap sebesar Rp13.109.362.000, -. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Sestama BPS RI Nomor: B-532/02000/PR.450/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Revisi DIPA Juli TA
DIPA VI	11 Juli 2024	13,109,362,000	13,109,362,000	
DIPA VII	15 August 2024	13,109,362,000	12,985,540,000	



2024. Revisi ini untuk mengakomodir penyesuaian anggaran pada Program Dukman dan Program PPIS. Revisi ini menyebabkan penambahan pagu operasional pada Program Dukman sebesar Rp160.540.000,-, pengurangan anggaran konsumsi rapat sebesar Rp17.475.000,-. Pada revisi ini BPS Prov. Gorontalo mengikutsertakan revisi antar satker untuk realokasi belanja pegawai sehingga pagu belanja pegawai berkurang sebesar Rp220.000.000,-. Secara total anggaran pada Program Dukman berkurang sebesar Rp.76.935.000,-.

Penyesuaian anggaran juga terdapat pada Program PPIS yang menyebabkan pengurangan anggaran sebesar Rp48.387.000,-. Penyesuaian meliputi realokasi anggaran antar kegiatan dan antar satker. Penyesuaian anggaran PPIS ini juga sekaligus dilakukan pembukaan pagu blokir AA untuk kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Seruti TA 2024 sehingga pagu blokir AA berkurang Rp347.071.000,- atau dari semula Rp685.295.000,- menjadi sebesar Rp.338.224.000,-. Secara total pagu anggaran berkurang sebesar Rp123.882.000,- atau total pagu menjadi sebesar Rp12.985.540.000,-.

Revisi Satker IV ini merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka Rekomendasi inspektorat akun ekstrakomptabel revisi POK

POK IV 21 Agustus 12,985,540,000 12,985,540,000  
2024



DIPA VIII	18 September 2024	12,985,540,000	13,005,180,000	<p>lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp12.985.540.000, -.</p> <p>Revisi DJA dalam rangka melakukan penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024. Tidak terdapat perubahan pagu pada program Dukungan Manajemen (Dukman) sehingga pagu masih tetap Rp. 10.897.778.000 sedangkan untuk Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terdapat penyesuaian belanja kegiatan dimana terdapat selisih pagu bertambah sebesar Rp 19.640.000. Revisi ini mengakibatkan pagu total bertambah menjadi Rp. 13.005.180.000</p> <p>Revisi Kanwil berupa pemutakhiran POK dan penyesuaian halaman III DIPA (penyesuaian realisasi belanja Juli–September 2024 dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober - Desember 2024). Adapun pemutakhiran dan penyesuaian POK tersebut diperlukan dalam rangka penyesuaian belanja barang (termasuk pada akun program nasional). Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp13.005.180.000.</p> <p>Revisi Satker V ini merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan Rakorda SEP dan revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan</p>
DIPA IX	16 Oktober 2024	13,005,180,000	13,005,180,000	
POK V	21 Oktober 2024	13,005,180,000	13,005,180,000	



5  
DIPA X November 13,005,180,000 12,621,942,000  
2024

KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.005.180.000, -.

Revisi DJA dalam rangka penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024 sesuai Surat Sestama BPS RI Nomor B-860/02000/PR.450/2024

Adapun tujuan dari revisi tersebut di antaranya :

1. Optimalisasi Belanja Pegawai.
2. Penambahan Anggaran Belanja Modal (Laptop)
3. Penyesuaian Belanja Pegawai untuk CPNS

22  
DIPA XI November 12,621,942,000 12,621,942,000  
2024

Revisi Kanwil dalam rangka Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian dan Lembaga Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-1023/MK.02/2024 Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA serta Surat Sestama BPS RI No. B-928/02000/PR.400/2024

Penyampaian Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas kemudian Surat Sestama BPS RI No. B939/02000//PR/400/2024

Penyampaian Target Penghematan BPS TA 2024 dimana Revisi ini tidak menambah ataupun mengurangi total pagu namun menambah nilai blokir pada Petikan DIPA halaman IV.a dari Rp.334.224.000 menjadi Rp.428.748.000



	29				Revisi Satker VI ini merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan Workshop Media, kegiatan agen statistik, evaluasi PMTB dan revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp12.621.942.000, -.
POK VI	November 2024	12,621,942,000	12,621,942,000		
	18				Revisi Satker VII ini merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan pembinaan diseminasi, pencetakan kuesioner harga, susenas maret 2025, dan revisi POK lainnya yang menjadi kewenangan KPA. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp12.621.942.000, -.
POK VII	Desember 2024	12,621,942,000	12,621,942,000		
	26				Revisi belanja pegawai antar satker karena kekurangan belanja pegawai untuk PPH PNS sehingga perlu dilakukan revisi antar satker untuk belanja pegawai. anggaran belanja pegawai BPS Provinsi Gorontalo bertambah sebesar 24.8000.000 yang diperoleh dari satker BPS Kabupaten Gorontalo.
DIPA XII	Desember 2024	12,621,942,000	12,646,742,000		
	27				Revisi DIPA 13/revisi pemutakhiran KPA ini merupakan revisi realokasi anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan statistik distribusi, statistik harga, statistik KTIP, serta operasional dan emeliharaan perkantoran
DIPA XIII	Desember 2024	12,646,742,000	12,646,742,000		

